

# PENINGKATAN PENDIDIKAN PADA MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN BANDUNG

( Suatu alternative untuk menekan terjadinya perambahan hutan )

Oleh: Wahyu Eridiana\*)

## ABSTRAK

*Hutan di Kabupaten Bandung dari 89.331,190 ha, sebesar 16.613 ha, telah digarap dijadikan lahan pertanian oleh 34.740 KK penduduk sekitarnya. Penggarapan hutan oleh para petani dengan tanaman musiman, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam pada pihak penanggung jawab pengawasan dan pengelolaan, karena akan menimbulkan gangguan kelestarian lingkungan di kawasan hutan tersebut.*

*Sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, dipilihlah bentuk kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dinamakan PHBM, dengan tanaman pokoknya adalah tanaman kopi. Program ini mulai dilaksanakan tahun 2000 di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dengan luas areal tanam 54,51 ha. Pada tahun 2001 diperluas ke Kecamatan Kertasari dengan luas tanaman di 2 kecamatan tersebut sebesar 150 ha. Pada tahun 2004 di perluas ke kecamatan Pacet dan luas tanamnya menjadi 275 ha. Terakhir pada tahun 2005 diperluas ke 10 kecamatan dengan luas areal tanam mencapai 889 ha.*

*Penanganan melalui program PHBM, baru menyentuh satu sisi yaitu mengantisipasi kerusakan hutan. Sedangkan akar permasalahan seperti andalan hidupnya hanya didapatkan dari pertanian dengan lahan sempit, tidak memiliki keterampilan lain, tingkat kesadaran lingkungan rendah, yang mendorong tindakan perambahan, belum dilakukan pemecahan yang seksama. Sehubungan hal itu, peningkatan pendidikan pada masyarakat hutan dapat dipilih untuk dijadikan solusi pemcahan masalah diatas dan melengkapi penanganan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah.*

**Kata Kunci:** Pendidikan masyarakat, perambahan hutan.

---

\*) Drs. Wahyu Eridiana, M.Si., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Barat. Kabupaten ini termasuk kepada salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk besar, pada tahun 2005 berjumlah 4.145.967 jiwa. Tempat-tempat pemukimannya dapat dijumpai hingga ke daerah pinggiran pegunungan, baik dibagian utara maupun dibagian selatan. Sumber penghidupan mereka pada umumnya sebagai petani, yang beberapa tahun belakangan telah memanfaatkan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian mereka. Sehingga kawasan hutan di Kabupaten Bandung saat ini berada dalam ancaman penurunan kelestariannya. Untuk menghindari hal tersebut pihak pemerintah Kabupaten Bandung berupaya dengan segenap kemampuannya agar hutan dapat tetap terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya

## 2. Fungsi Hutan bagi Kehidupan Manusia

Wajarlah bila kita semua penuh perhatian terhadap keberadaan hutan, karena hutan memiliki sarat manfaat bagi kehidupan kita semua.. Manfaat hutan dapat kita telusuri dari fungsi hutan itu sendiri, yang menurut Departemen Kehutanan berfungsi sebagai:

- a. mengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya banjir.
- b. Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya untuk keperluan industri dan ekspor.
- c. Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong hasil hutan khususnya.
- d. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
- e. Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, margasatwa, taman wisata dan taman buru, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata.
- f. Merupakan salah satu unsur basis strategis pertahanan nasional.
- g. Memberi manfaat lain yang berguna bagi umum

Fungsi hutan tidak terbatas sebagaimana tersebut di atas. Menurut para ahli lingkungan, oksigen bumi ini dihasilkan dari hutan. Indonesia memiliki hutan tropis yang kondisinya paling baik diantara Negara Zaire di Afrika dan Brasil di Amerika selatan. Dengan luas hutan sekitar 142 juta ha, yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, diperkirakan hutan tropis Indonesia ini mampu mensuplai 50 % kebutuhan oksigen (Dephut, 1996:219). Disamping penghasil oksigen juga hutan berfungsi sebagai filter bagi zat polutan yang berbau dalam udara. Sejo dan kawan-kawan (dalam Cheril, 1992:100) mengemukakan bahwa akan diperlukan penanaman kembali hutan baru yang meliputi wilayah sekitar 465 juta ha untuk menghilangkan 2,9 juta ton karbon

yang berakumulasi setiap tahun di atmosfer. Adalah tidak mungkin untuk menanam pohon pada skala tersebut, tetapi proyek- proyek penghutan kembali dapat mengurangi akumulasi karbon dan bersamaan dengan itu memberikan keuntungan lain terhadap kualitas air dan species di hutan. Karena itu, sepantasnyalah kita ikut berpartisipasi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini supaya tidak terjadi penurunan luas maupun rusak keberadaannya.

### **3. Luas dan Kerusakan Hutan di Kab. Bandung**

Luas hutan di Kabupaten Bandung sebesar 29 % nya dari luas wilayah keseluruhan atau sebesar 89.331,190 ha. Dari luas tersebut terdiri atas 2 kawasan yaitu Hutan Negara dan Hutan rakyat. Hutan negara seluas 76.603,27 ha dan hutan rakyat sebesar 13.017 ha. Pada saat ini hutan negara dalam gangguan perambahan oleh penduduk sekitarnya. Perambahan tersebut menjadi semakin serius setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1977 yang lalu. Luas hutan yang dirambah sampai akhir tahun 2004 tercatat sebesar 16.613,10 ha. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan pihak dinas terkait maupun pihak pemerintah daerah kabupaten Bandung, karena kawasan hutan yang berada di bawah tanggung jawabnya mendapat gangguan yang cukup serius dan menyulitkan untuk dicarikan cara penyelesaiannya.

### **4. Jumlah Perambah dan Latar Belakang Sosialnya**

Jumlah perambah hutan di Kabupaten Bandung menurut dinas Hutbun tercatat sebesar 38.474 kepala keluarga. Mereka tersebar di 2 KPH, yaitu di KPH Bandung Selatan sebanyak 34.740 Kepala keluarga dan di KPH Bandung Utara sebanyak 3.743 Kepala Keluarga. Alasan alasan mereka melakukan penyerobotan terhadap kawasan hutan Negara tersebut menurut dinas Hutbun dilatarbelakangi oleh:

- a. tekanan ekonomi yang cukup kuat
- b. terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian.
- c. rata rata memiliki lahan pertanian yang sempit.
- d. penegakan hukum terhadap pelanggar yang lemah.
- e. adanya pemilik modal yang sengaja membiayai usaha tani para perambah

Perambahan ini dikhawatirkan akan semakin luas dampaknya dimasa yang akan datang, sehingga langkah-langkah untuk memperkecil hal yang tidak diharapkan telah diupayakan semaksimal mungkin melalui kemampuan yang ada.

### **5. Penanganan Masalah Gangguan Hutan di Kab. Bandung**

Mencegah kerusakan hutan di Kabupaten Bandung tidaklah mudah, karena berhadapan dengan masyarakat yang sudah barang tentu akan berbeda

dengan cara penaganan mahluk di luar manusia. Mengusir secara langsung akan dianggap tidak berperikemanusiaan karena berkenaan dengan tuntutan kehidupan mereka, masalah yang sudah berada di depan mata adalah konflik bila hal itu dilakukan.

Untuk menghindari terjadinya masalah yang rumit dan membahayakan, maka program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) menjadi pilihan yang dianggap paling aman bagi kedua belah pihak. Program ini tentu bukan suatu yang final, karena perambah masih tetap berada dikawasan yang seharusnya terisolasi dari mereka itu, ini berarti ancaman terhadap kelestarian hutan masih tetap besar. Seharusnya para petani meninggalkan kegiatannya dari kawasan hutan konservasi tersebut agar kawasan hutan terhindar dari berbagai gangguan. Penanganan ke arah ini memerlukan pemikiran, waktu, biaya, dan situasi yang tepat. Sementara tindakan pengamanan harus secepatnya dilakukan. Karena itu, pada tahun 2000 melalui program PHBM para petani diperkenankan untuk menanam kopi di kawasan hutan negara yang telah digarap mereka. Daerah pertama terpilih yaitu Kecamatan Pangalengan dengan luas areal tanam sebesar 54,51 ha. Pada tahun 2001 diperluas ke Kecamatan Kertasari, dan luas keseluruhan tanaman kopi di dua kecamatan tersebut mencapai 150 ha. Pada tahun 2004 diperluas ke Kecamatan Pacet, sehingga luas keseluruhan dari 3 kecamatan menjadi 275 ha. Pada tahun 2005 tanaman kopi diperluas ke 10 kecamatan dan luas tanamannya mencapai 889 ha. Penanganan sampai akhir tahun 2005 baru sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar belum dapat direalisasikan, harapannya bisa terwujud seluruhnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

## **6. Sasaran Program PHBM di Kabupaten Bandung**

Ada beberapa sasaran yang ingin di capai melalui progam PHBM, yaitu:

- a. memperbaiki kondisi sumber daya alam daerah hulu yang seharusnya menjadi kawasan konservasi dan catchment area Das Citarum sesuai fungsinya.
- b. terkendalinya penggunaan lahan hutan dari penjarahan dan terwujudnya azas teknik konservasi.
- c. Perum Perhutani dan para petani sekitar hutan dapat meningkatkan produktifitas lahan dengan pola kerja sama.
- d. Pemerintah dapat melaksanakan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan dukungan masyarakat.
- e. Terjadinya diversifikasi usaha komoditi yang lebih maju dan berkembang secara merata yang mampu menyerap tenaga secara maksimal.

Ke lima sasaran tersebut, menjadi target utama dalam waktu yang singkat ini dan untuk lebih menyempurnakan pemecahan perlu adanya suatu upaya lanjutan yang mengarah kepada bagaimana para petani di sekitar hutan tidak menjadi perambah lagi. Sehubungan dengan hal itu kita perlu mengetahui sumber permasalahannya.

## **7. Akar Permasalahan yang Perlu Dipecahkan**

Memperhatikan upaya yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah suatu langkah yang tepat, yaitu ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif yang lebih luas di kawasan hutan negara dan ini merupakan persoalan mendesak. Namun, alasan penduduk melakukan suatu tindakan memanfaatkan hutan untuk memenuhi tuntutan hidup mereka belum banyak disentuh melalui cara penanganan PHBM tersebut. Jadi masih harus ada langkah pemecahan lain yang mengarah kepada akar permasalahan tindakan perambahan itu.

Para perambah hutan sebagian besar hidupnya hanya mengandalkan bertani, memiliki lahan pertanian rata-rata sempit, berpenghasilan rendah, keterampilan di luar pertanian terbatas, kesadaran terhadap lingkungan yang rendah dan menurut data statistik rata-rata tanggungan keluarga di desa-desa sekitar hutan hampir mencapai 4 orang. Angka sebesar itu menunjukkan jumlah penduduk di sekitar hutan dikemudian hari akan terus bertambah dan membutuhkan lahan. Inilah sumber pendorong penduduk sekitar hutan melakukan perambahan, yang perlu dicarikan jalan pemecahannya. Andaikata sasaran pemecahan masalahnya tidak ditujukan kepada sumber permasalahan di atas, maka potensi untuk memanfaatkan hutan sebagai lahan garapan ke depan akan tetap besar, bahkan bisa lebih besar jika generasi barunya hanya pertanian semata yang bisa ia lakukan. Ini berarti masalah kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Bandung tidak dapat terselesaikan secara tuntas.

Berdasarkan uraian di atas, langkah selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kekuatan ekonomi, meningkatkan keterampilan di luar pertanian agar mata pencaharian pertanian tidak menjadi andalan utamanya dan bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap lingkungannya supaya dikemudian hari hutan tidak lagi menjadi sasaran aktivitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan yang cermat, luas dan mendalam dari berbagai disiplin ilmu yang terkait sangat dibutuhkan keterlibatannya dan pada kesempatan ini penulis memberanikan diri berpartisipasi menyumbangkan gagasan pemikiran dari sudut pandang ilmu sosiologi.

## 8. Dasar Pertimbangan

Ilmu sosiologi memandang pendidikan akan mengarahkan peserta didik sebagai mana dikemukakan oleh para ahli berikut.

Schneider (1986:522), pendidikan merupakan petunjuk yang sangat sensitif tentang posisi sosial ekonomis, karena pendidikan merupakan produk kesempatan hidup dan sekaligus juga merupakan faktor penentu utama bagi kesempatan hidup.

Miffen (1986:69), sekolah merupakan struktur utama untuk menanamkan sistem nilai umum selama tahun-tahun ini dan dalam mengarahkan para individu kearah jenis tempat-tempat peran yang dewasa untuk mana mereka dianggap kompeten atau tingkat motivasi yang wajar.

Nasution (1983:11), pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda.

Sokanto (1985:335), pendidikan memberikan suatu nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk berpikir secara objektif, hal mana akan dapat memberikan kemampuan baginya untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan jaman atau tidak.

Blau dan Duncan (dalam Robinson, 1986:298), pendidikan memperoleh arti yang semakin besar bagi status sosial pada umumnya dan pengalihan kedudukan sosial dari ayah kepada anak laki-laki pada khususnya.

Cohen (1983:273), fungsi pokok pendidikan formal dalam hubungannya dengan mobilitas vertikal adalah membekali individu dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasaran kerja. Tingkat pendidikan yang memadai akan menempatkan seseorang pada posisi yang menguntungkan bilamana ia harus bersaing dengan orang lain untuk suatu jabatan tertentu.

Vembriarto (1986:66), kebanyakan migran adalah orang yang berpendidikan; mereka mudah dan suka berganti pekerjaan; migran kebanyakan terdiri atas keluarga kecil. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mobilitas horijontal. Dapat diduga bahwa di Indonesia faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan pula dalam proses migrasi.

Robinson (1986:285), hanya dengan pendidikan itulah perekonomian mereka akan dapat diharapkan lepas landas memasuki pertumbuhan yang menggunakan kekuatan sendiri dan bebas dari segala kemacetan yang

ditimbulkan oleh kekurangan tenaga kerja terampil. Bagi politik dalam negeri investasi dalam pendidikan akan meningkatkan keadilan sosial; kemiskinan akan dapat dilenyapkan selama kaum miskin diberi kesempatan untuk mengenyam sekolah.

Miflen (1986:91) Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dapat memepertinggi kesanggupan pemasaran seseorang dan akhirnya apabila persekolahan diperpanjang , akan menuju ke posisi intermediet atau posisi kelas atas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peningkatan pendidikan dapat dipertimbangan sebagai salah satu cara untuk memecahkan faktor faktor yang mendorong terjadinya perambahan hutan tersebut.

## **9. Jenis Pendidikan dan Keterampilan**

Sebelum melaksanakan program pendidikan pada masyarakat sekitar hutan, terlebih dahulu harus melakukan pengelompokan keluarga petani perambah berdasarkan: usia, jenis kelamin, dan status perkawinan mereka. Gunanya adalah untuk memudahkan pemilihan jenis pendidikan yang tepat dan kelompok mana yang perlu didahulukan atau diprioritas pendidikannya.

Jenis pendidikan yang dapat ditawarkan yaitu pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan keterampilan jangka pendek bersertifikat (kurang dari 1 tahun). Bagi anak- anak usia sekolah yang masih duduk di Sekolah Dasar, dapat dibantu pendidikannya hingga menyelesaikan sekolah kejuruan tingkat menengah. Bagi anak-anak usia sekolah tetapi tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama maupun menengah atas diberikan pendidikan jangka pendek bersertifikat itu agar mereka memperoleh kekuatan ketika melamar pekerjaan. Demikian pula bagi kepala keluarga yang berusia produktif, keterampilan jangka pendek yang bisa cepat menghasilkan uang lebih diutamakan pelaksanaan programnya, supaya mereka dapat secepatnya mengalihkan pekerjaan atau mendapat tambahan penghasilan dari keterampilan barunya itu. Ibu-ibu rumah tangga dapat pula diberi pendidikan kewirausahaan, misalnya dengan membuat aneka makan yang bahan bakunya dari daerah itu sendiri.

Keterampilan jangka pendek yang bisa ditawarkan kepada mereka adalah: kursus cara memelihara dan pengemukan ternak, agro industri tanaman hias, kursus menyetir mobil, montir, menjahit, keterampilan memasak dan bikin macam macam kue serta makan cemilan, keterampilan mengelas, keterampilan bangunan dan ukiran serta keterampilan keterampilan lainnya yang saat ini banyak diserap dalam lapangan kerja di luar pertanian. Melalui perbaikan pendidikan di atas, diharapkan pada masyarakat hutan akan terjadi perubahan

struktur sosial yang akan mengarah kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dan lebih bermakna dalam kehidupannya.

## 10. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Program PHBM adalah model penanganan yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh para perambah di Kabupaten Bandung.
- b. Pada masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Bandung memerlukan adanya suatu perubahan sosial dan akselerasi perubahan itu dapat diwujudkan melalui proses pendidikan.
- c. Pendidikan dapat mengubah seseorang menjadi : lebih luas dalam cara pandangnya, lebih dewasa dalam cara berpikir, kesempatan peluang kerjanya lebih terbuka, memiliki keahlian, gengsi sosial lebih terangkat, motivasi dan kepercayaan diri lebih tinggi, mobilitas vertical maupun horizontal tidak terbatas, jaringan sosial lebih terbuka, semua ini merupakan capital cultural yang dapat diperoleh melalui pendidikan.
- d. Peningkatan pendidikan dapat dipilih untuk memecahkan permasalahan terjadinya perambahan hutan di kabupaten Bandung.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi Abu, 1991. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cohen Bruce, J. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Faisal Sanafiah. Tanpa tahun. *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Miflen Frank, J. 1986. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, S. 1987. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Jemmars.
- Pemda Kab. Bandung. 2005. *Penanganan Perambah Hutan di Kabupaten Bandung*. Bandung.
- Robinson Phillip. 1986. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Statistik Kab. Bandung, 2002. *Jumlah Penduduk dan Seks Rasio Menurut Desa Kabupaten Bandung*. Bandung.
- Schneider Uegene, V. 1986. *Sosiologi Industri*. Jakarta: Aksara Persada.
- Soekanto Soerjono. 1985. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Vembriarto, St. 1987. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Paramita.